



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2019-2020
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke-	: 17
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum (Audiensi)
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Selasa, 26 November 2019
Waktu	: Pukul 11.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komsii II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Penyampaian Aspirasi terkait Draft RUU tentang Provinsi Bali beserta Naskah Akademik sebagai bahan kajian dan pertimbangan
Ketua Rapat	: Arif Wibowo/Wakil Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dra. Hani Yuliasih, M.Si./Kabagset. Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 19 (Sembilan belas) dari 50 (lima puluh) Anggota Komisi II DPR RI B. Gubernur Provinsi Bali

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Umum (Audiensi) Komisi II DPR RI dengan Pemerintah Provinsi Bali, dengan agenda Penyampaian Aspirasi terkait Draft RUU tentang Provinsi Bali beserta Naskah Akademik sebagai bahan kajian dan pertimbangan, hari Selasa, 26 November 2019, dibuka pukul 11.00 WIB oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Arif Wibowo dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. CATATAN RAPAT

Pemerintah Provinsi Bali menyampaikan beberapa hal, sebagai berikut:

1. Pembentukan Provinsi Bali (dengan kekhususan) agar dapat dibahas dan dimasukkan dalam Prolegnas 2020 yang menjadi usul inisiatif Komisi II DPR RI.
2. Gubernur Provinsi Bali menyampaikan bahwa Naskah Akademik/Kajian Akademik sudah ada.
3. Gubernur Provinsi Bali menyampaikan bahwa RUU tentang Provinsi Bali terdiri dari 12 BAB dan 39 Pasal.
4. Payung hukum pembentukan Provinsi Bali masih berpedoman pada UU No. 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
5. Komisi II DPR RI telah mendengarkan masukan terkait Penyampaian Aspirasi terkait Draft RUU tentang Provinsi Bali beserta Naskah Akademik sebagai bahan kajian dan pertimbangan yang disampaikan oleh Gubernur Provinsi Bali. Setelah mendengarkan masukan terkait Penyampaian Aspirasi terkait Draft RUU tentang Provinsi Bali beserta Naskah Akademik sebagai bahan kajian dan pertimbangan, Komisi II DPR RI akan melakukan pendalaman atas masukan tersebut sebagai bahan dalam rapat intern Komisi II DPR RI.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 12.00 WIB.

Jakarta, 26 November 2019
KETUA RAPAT



ARIF WIBOWO
A-210